



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS OLEH PEMBIMBING TESIS.....	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN TESIS OLEH TIM PENGUJI TESIS	<i>ii</i>
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iv</i>
ABSTRAK.....	<i>v</i>
ABSTRACT.....	<i>vi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>vii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>ix</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>ix</i>
DAFTAR ISTILAH.....	<i>ix</i>
BAB I. PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. <i>Standing Position</i>	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	<i>14</i>
2.1. Implementasi Kebijakan	14
2.2. Regulasi.....	17
2.3. Hambatan atau Kendala	21
2.4. Data dan Informasi	23
2.5. <i>Horse Shoe Nail</i>	24
2.6. Kerangka Pikir Penelitian	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	<i>28</i>
3.1. Jenis Penelitian.....	28



3.2.	Pendekatan Penelitian	28
3.2.	Kerangka Penelitian	29
3.3.	Pengumpulan Data	31
3.4.	Analisis dan Penyajian Data	33
<i>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI..... 35</i>		
4.1.	Gambaran Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	35
4.1.1.	Sejarah kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.....	35
4.1.2.	Struktur Organisasi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	40
4.1.3.	Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.....	41
4.2	Gambaran Umum Lahan Sawah yang Dilindungi.....	42
<i>BAB V. ANALISIS 46</i>		
5.1.	Regulasi.....	46
5.2.	Hambatan dan Kendala	52
5.2.1	Proses atau Tahapan dalam Implementasi Lahan Sawah yang Dilindungi	62
5.2.2	Data dan Informasi	64
5.3.	Dampak Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi.....	74
<i>BAB VI. PENUTUP 76</i>		
5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Rekomendasi	78
<i>DAFTAR PUSTAKA A</i>		
<i>DAFTAR LAMPIRAN E</i>		



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Responden
Tabel 2	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Banten
Tabel 4	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Jawa Barat
Tabel 5	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Jawa Tengah
Tabel 6	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tabel 7	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Jawa Timur
Tabel 8	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Bali
Tabel 9	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tabel 10	Ketersediaan RDTR di 8 (delapan) Provinsi yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pikir
Gambar 2	Kerangka Penelitian
Gambar 3	Peta Lahan Sawah yang Dilindungi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Gambar 4	Alur Proses Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi

DAFTAR ISTILAH

1. *Horse Shoe Nail* = sepatu kuku kuda merupakan istilah terhadap keterbatasan administrasi publik yang menggambarkan bahwa salah satu faktor kecil menyebabkan terganggunya pelaksanaan kegiatan atau program kebijakan.
2. *Think-tank* = lembaga pemikir lembaga kebijakan yang merupakan organisasi nonpemerintahan